

BAB III
PEMBAHASAN
ANALISIS PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KOTA
YOGYAKARTA DALAM SOSIALISASI PEMILIHAN PRESIDEN
TAHUN 2014

A. Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Yogyakarta dalam Pemilihan Umum Presiden 2014

Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 sosialisasi pemilihan umum (pemilu) adalah proses penyampaian informasi dan sosialisasi tentang tahapan dan program dalam penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Untuk mengetahui peran KPUD kota Yogyakarta dalam mensosialisasikan pemilu presiden 2014 menggunakan dua indikator yaitu : (1) meningkatkan pemahaman dan pengetahuan, (2) membentuk agen-agen Relawan Demokrasi (relasi). Penelitian dilapangan dengan membagi beberapa indikator pertanyaan kepada KPUD Yogyakarta selaku badan penyelenggara pemilu terkait dengan sosialisasi pemilu presiden 2014. Dengan demikian dapat di analisa apakah peran sosialisasi tersebut berjalan baik atau tidak.

1. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan

Di kota Yogyakarta sendiri terdapat 310.280 daftar pemilih tetap (DPT) yang telah dirilis oleh KPUD kota Yogyakarta, adapun pembagiannya jenis gendernya, diolah dalam data sebagai berikut :

Tabel 3.1
Akumulasi Total Jumlah Pemilih.

No	Jenis Kelamin	Jumlah (dalam jiwa)
1	Laki-Laki	149.235
2	Perempuan	161.045
	Total	310.280

Sumber: Laporan Mutakhir KPUD kota Yogyakarta, diolah.

Tabel 3.2
Jumlah Pemilih DPT Kota Yogyakarta 2014.

No	Kecamatan	DPT		Total
		Laki – laki	Perempuan	
1	Mantrijeron	12.585	13.598	26.183
2	Kraton	8.021	8.890	16.911
3	Mergasan	11.594	12.656	24.250
4	Pakualaman	4.379	4.565	9.035
5	Gondomanan	5.889	6.481	12.370
6	Ngampilan	6.604	7.321	13.952
7	Wirobrajan	9.875	10.518	20.393
8	Gedongtengen	7.492	8.103	15.595
9	Jetis	9.839	10.531	20.370
10	Tegalrejo	12.927	13.735	26.662
11	Danurejan	8.574	8.934	17.508
12	Gondokusuman	16.244	17.935	34.159
13	Umbulharjo	23.797	25.493	49.290
14	Kotagede	11.435	12.195	23.639
	Jumlah	149.235	161.280	310.280

Jumlah pemilih total DPT kota Yogyakarta 2014, diolah.

Dari data dari KPUD kota Yogyakarta tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah DPT di regional kota Yogyakarta tinggi, dengan jumlah yang tinggi tersebut maka sosialisasi KPUD kota Yogyakarta dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 menjadi tugas yang tidak mudah untuk diimplikasikan kepada masyarakat, sehingga diperlukan strategi dan metode pendekatan kepada masyarakat, apalagi disetiap tahun ada perubahan, khususnya penambahan bagi para pemilih baru. Untuk

memperdalam bagaimana meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang pemilu presiden dan wakil presiden 2014, maka peneliti mewawancarai Sri Surani SP, ;

“Dalam peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang pemilu presiden di tahun 2014 ya, kami bekerja sama dengan dinas pendidikan, media kompas dan camat di 14 kecamatan yang ada di kota Yogyakarta dalam memberikan sosialisasi terhadap pemilih pemula, nah untuk meningkatkan pemahaman kepada masyarakat secara umum, kami mengacu pada peraturan perundangan yang telah ditetapkan sesuai UU, kemudian kita memperhatikan segmentasi sesuai peraturan KPU RI no 39 tahun 2009 ya, seperti meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang tahapan dan program pemilihan presiden dan wakil presiden, meningkatkan pengetahuan tentang hal teknis, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya, sehingga harapan tinggi pada tingkat partisipasi pemilih pada pemilu 2014.”

(Wawancara dengan Sri Surani SP, pada Oktober 2016)

Dalam uraian yang telah dijelaskan oleh Sri Surani, menegaskan bahwa untuk memperdalam pemahaman dan pengetahuan tentang pemilu presiden di 2014 harus hierarki dengan aturan KPU RI, sehingga ada korelasi yang baik antara pusat daerah dalam mewujudkan tujuan sosialisasi pemilu yang baik, penggandengan instansi pendukung yaitu dinas pendidikan sebagai peran sentral dalam memberikan pemahaman kepada pihak pemilih pemula melalui mekanisme yang telah ditetapkan, dan juga menggandeng para Camat yang berada di bawah struktur wewenang Pemerintah kota Yogyakarta, sehingga dengan menggandeng camat dalam proses sosialisasi akan mempermudah KPUD kota Yogyakarta dalam menjadi fasilitator proses sosialisasi tahapan dan proses pemilu.

Di wawancara lain, dijelaskan sebagai berikut;

“untuk masuk dalam ranah pengenalan tentang pemilu ya mas, kita melakukan pendekatan melalui warga-warga khususnya di kota Yogyakarta, dan untuk yang pemilih pemula, kita bekerja sama dengan instansi lain, misalnya aja ya mas dengan dinas pendidikan kota, media kompas, sehingga dengan kerjasama yang kita laksanakan itu mempermudah akses kita untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara umum dan pemilih pemula secara khususnya.”

(Wawancara dengan Sri Surani SP, pada Oktober 2016)

Dari uraian tambahan yang telah disampaikan oleh Sri Surani, maka peran KPUD kota Yogyakarta khususnya, dalam memperhatikan tingkatan partisipasi masyarakat baik pemilih yang sudah terdaftar maupun pemilih pemula dikatakan baik, karena segala sektor pemilih dirangkul dalam mensukseskan proses pelaksanaan pemilu presiden 2014. Penguatan pengetahuan kepada pemilih pemula secara khusus dan pemilih yang sudah memiliki hak suara perlu lebih intens dalam memberikan pengetahuan tentang tahapan pemilu presiden dan wakil presiden, dikarenakan mekanisme pemilihan yang tidak sama dengan pemilihan sebelumnya maka perlu adanya edukasi terhadap kedua belah pemilik suara, baik pemula maupun yang sudah terdaftar sebagai DPT.

Sehingga dengan adanya proses perangkulan yang baik pada tingkatan masyarakat yang sudah memiliki hak suara dan terdaftar sebagai DPT KPUD kota Yogyakarta dan juga para pemilih pemula akan memberikan hasil yang selaras dan atau terwujudnya cita-cita sosialisasi dengan perencanaan ataupun tujuan awal proses sosialisasi.

Cara KPU dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan ke masyarakat tentang pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 bekerjasama

dengan dinas pendidikan sebagai peran sentral pemahaman kepada pihak pemilih pemula, selanjutnya bekerjasama dengan pihak media kompas dan bekerjasama dengan camat di 14 kecamatan sebagai fasilitator proses sosialisasi tahapan dan proses pemilu.

2. Membentuk agen-agen relawan demokrasi (relasi)

Dalam peraturan Undang-undang Nomor 23 tahun 2013 pasal 19 pendidikan politik dilakukan melalui mobilisasi sosial, pemanfaatan jejaring sosial, media lokal atau tradisional, pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi (relasi) serta bentuk-bentuk lain yang menjadikan tujuan dari pendidikan politik. Dalam melakukan sosialisasi pemilihan umum, Komisi pemilihan umum kota Yogyakarta membentuk agen-agen atau Relawan Demokrasi (RELASI).

Terkait dengan ini, komisi pemilihan umum kota Yogyakarta sudah menjalankan pembentukan relawan demokrasi. Dalam buku petunjuk pelaksanaan program relawan demokrasi pemilihan umum tahun 2014, relawan demokrasi memang sengaja dibentuk sebagai sebuah gerakan sosial untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Hadirnya relawan demokrasi dikhususkan untuk mendorong partisipasi beberapa segmen pemilih melalui kegiatan sosialisasi, kelompok sasaran relawan demokrasi dibagi kedalam 5 segmen pemilih strategi, yaitu pemilih pemula, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, kaum marjinal, kelompok agama. Bentuk segmentasi yang dibuat menunjukkan bahwa ada perhatian khusus yang diberikan oleh pihak

penyelenggara pemilihan umum kepada kelompok-kelompok tersebut agar terlihat dalam kegiatan pemilihan umum.

a. Pemilih pemula.

Pemilih pemula yang di maksud disini adalah pemilih yang akan genap berusia 17 tahun pada tanggal 9 juli 2014. Jumlah pemilih pemula kota Yogyakarta sebanyak 1.142 jiwa dengan jumlah pemilih pemula laki - laki sebanyak 549 jiwa dan pemilih pemula perempuan sebanyak 593 jiwa. Disni peneliti mewawancarai Sri Surani SP seperti apakah peran KPUD kota Yogyakarta bersosialisasi untuk para pemilih pemula, dan hasil wawancarai tersebut adalah :

“Di pemilih pemula ini kita berkerja sama dengan dinas pendidikan untuk melakukan sosialisasi dengan teman-teman pemilih pemula untuk di izinkan masuk kedalam seluruh sekolah negeri di kota Yogyakarta khususnya SMA (sekolah menengah atas) untuk bisa mengajar di sesi pelajaran PPKN dengan mengisi materi pemilu, kemudian melakuakn simulasi dibeberapa sekolah berkerja sama dengan kompas group melakukan simulasi untuk pemilih pemula kemudian leflate dan pamflata disebarakan ke pemilih pemula, kemudian kpu juga masuk dimana tempat nongkrongnya anak-anak muda (cafe) untuk menyebarkan pamflata ke pemilih pemula.”

(wawancara dengan Sri Surani, Oktober 2016)

Dari hasil wawancara dengan Sri Surani, SP. Peneliti akan membahas segmen persegmen dari apa yang sudah dilakukan oleh KPU dalam sosialisasi ke pemilih pemula.

1. Bekerjasama dengan dinas pendidikan

Dengan melakukan kerjasama dengan dinas pendidikan untuk memudahkan akses Relasi bersosialisasi dengan pemilih pemula dan pihak sekolahpun mendapatkan keuntungan dari pihak KPU karena dengan adanya

sosialisasi tersebut di persekolahan mendapatkan materi khusus tentang pengetahuan pemilihan umum dan tata cara pelaksanaannya, sehingga dengan adanya KPU *goes to school* akan memberikan implusi bagi perkembangan politik dimasa yang akan datang.

2. Bekerjasama dengan Kompas group

Kerjasama KPU dengan Kompas group, sebuah terobosan inovasi baru khususnya dalam pelaksanaan simulasi penyelenggaraan pemilu presiden dengan adanya pergerakan ini KPU lebih mudah bersosialisasi karena adanya Kompas group, media perantara itu akan lebih mudah di ketahui oleh banyak masyarakat secara umum, dan masyarakat kota Yogyakarta secara khusus, dan juga karena Kompas group salah satu media nasional yang sudah mempunyai kapabilitas sebagai salah satu media nasional, sehingga dengan adanya kerjasama dengan pihak swasta yakni media nasional, maka akan memberikan akses mudah bagi KPU dalam memberikan pengetahuan dan informasi tentang pelaksanaan pemilu presiden.

3. Bersosialisasi dengan cara “jemput bola”

Cara KPU bersosialisasi dengan memasuki tempat berkumpulnya anak muda, baik di café, zona terbuka, pusat perbelanjaan dan tempat strategis lainnya, dengan cara sosialisasi seperti ini akan menarik minat anak muda bagi yang belum bisa tahu dan belum mengerti tentang tahapan pemilihan umum diharapkan bisa menarik antusiasme dan memperoleh informasi baru yang bisa diperoleh, tidak hanya di lingkup pembelajaran sekolah saja tetapi juga bisa di dapatkan di luar jam sekolah atau di luar kelas melalui pendekatan

sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD kota Yogyakarta. Bagi peneliti terobosan “jemput bola” (mengunjungi pemuda atau anak muda) ditempatkan umum lebih menjadikan peran KPUD kota Yogyakarta melalui Relasi semakin semarak, karena selain mengacu pada modul aturan yang telah ditetapkan oleh KPU RI, melainkan juga melihat fenomena di masyarakat kota Yogyakarta, khususnya para anak muda yang telah berkembang seiring dengan multikulturalisme budaya dan peradaban di kota Yogyakarta itu sendiri.

Dalam waktu yang berbeda peneliti melakukan wawancara lain yang dilakukan dengan salah satu koordinator Relasi dibidang sosialisasi di tingkatan pemilih pemula yakni Nuzul Hafiazah, tujuan wawancara kepada pihak koordinator ini untuk mencari informasi lebih mendalam tentang pelaksanaan sosialisasi yang telah dilakukan oleh KPUD kota Yogyakarta melalui Relasi, adapun penuturan yang bersangkutan adalah sebagai berikut;

“Pada dasarnya mas, kita dibekali dulu pemahaman dan pengetahuan tentang peran Relawan Demokrasi itu sendiri, dan dari pihak KPUD menjelaskan secara detail bagaimana kerja kami nantinya pada waktu diterjunkan ke lapangan. Sehingga kami mengerti akan jobdesk kami selaku koordinator yang bergerak untuk mensosialisasikan pemilu 2014, kerja kami dilapangan merangkul kalangan muda untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang prosesi pemilu, walaupun juga sudah ada ya yang masuk sekolah, tetapi kami juga membuat group-group kecil guna memperlancar kinerja kami. Selebihnya kami melakukan kepada para pemuda dan pemilih pemula untuk mengajak mereka memilih pada pemilu 2014 silam, dengan mensimulasi tata cara pemilihan, memberikan brosur dan pamflet, serta mengajak mereka berinteraksi dalam permainan agar mereka lebih tertarik untuk menggunakan hak pilihnya itu.”

(wawancara dengan Nuzul, pada Oktober 2016)

Dari untaian penjelasan yang dijelaskan oleh Nuzul H pada sesi wawancara lanjutan yang dilakukan oleh peneliti, “sayap” demokrasi yang dinamakan Relasi ini merupakan salah satu pilar penting dalam pelaksanaan sosialisasi pemuda, hemat peneliti perekrutan kawula muda sebagai garda depan dalam mensosialisasikan tentang pemilu kepada para pemilih pemula mempunyai nilai positif, hal ini bisa dikarenakan kedekatan atau kerelatifan umur yang tidak terpaut cukup jauh, sehingga memudahkan untuk memberikan pengetahuan melalui Relasi di bidang pemilih pemula. Pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh Relasi pemilih pemula seperti ini menggunakan metode pendekatan sosial yang dikemukakan oleh Haryanto (2001:2), dan untuk klasifikasi dari teori yang dikemukakan oleh Haryanto, yang paling relevan dengan kinerja dari Relasi pemilih pemula adalah pada klasifikasi kelompok pertemanan (per group), sekolah sebagai media pendekatan. Dalam pendekatan itulah yang dinilai paling mudah untuk memberikan pemahaman-pemahaman tentang sosialisasi pemilu, sehingga perjalanan sosialisasi akan lebih efektif diterima oleh para pemilih pemula.

Penerapan metode baru yang dilakukan oleh KPUD kota Yogyakarta diharapkan akan mampu menarik minat para pemilih pemula, sehingga target capaian pemilih secara total dapat terpenuhi pada umumnya dan meningkatnya presentase pemilih pemula di pemilu presiden dan wakil presiden 2014. Akan tetapi melihat jumlah pendatang yang sangat banyak dan KPUD kota Yogyakarta juga perlu menyeleksi dalam pola sosialisasi “jemput bola” ini masyarakat atau lebih khususnya adalah pemuda kota Yogyakarta yang

memiliki hak pilih dalam pemilu, karena yang dikhawatirkan adalah salahnya sasaran sosialisasi sehingga akan tidak tercapai dalam substansi dari tujuan sosialisasi itu sendiri.

Komisi pemilihan umum disini bereperan sebagai fasilitator dalam melakukan sosialisasi untuk pemilih pemula, KPU mempunyai peran sebagai jembatan ke dinas pendidikan untuk memudahkan akses relasi dalam bersosialisasi untuk pemilih pemula dan juga sebagai jembatan dengan kompas group untuk melaksanakan simulasi.

Dalam melakukan sosialisasi ke pemilih pemula terdapat kurangnya efektifitas dalam bersosialisasi dengan menggunakan cara jempot bola, dikarenakan tidak bisa dipastikan di setiap tempat bersosialisasi semua yang ada di tempat tersebut adalah sebagai daftar pemilih tetap kota Yogyakarta.

b. Disabilitas atau difable.

Kaum disabilitas adalah seseorang yang mempunyai kekurangan mental maupun fisik yang dialami dalam diri seseorang, di dalam perundang-undangan kaum difable ini dijamin haknya sebagai pemilik hak suara di pemilu sesuai dengan ketetapan yang berlaku. Di kota Yogyakarta kaum difable diberikan hak untuk menggunakan hak suaranya melalui mekanisme pemilihan yang telah ditetapkan oleh KPUD kota Yogyakarta. Adapun data pemilu dari kaum difable tersebut adalah:

Table 3.3
Data pemilu kaum difable

No	Kategori disabilitas	Jumlah
1	Tuna netra / buta	126
2	Tuna rungu / wicara	131
3	Fisik	42
4	Daksa	-
5	Lainnya	1
	Total	300

Daftar pemilih difable, sumber KPU, diolah.

Untuk menguatkan analisa tentang difable maka peneliti melakukan wawancara dengan pihak KPU adapun transkrip dari wawancara sebagai berikut :

“Kemudian untuk teman teman difable kita bekerja sama dengan teman teman organisasi bagian difable (sigap, cikal, sabda) dan teman teman kelompok difable yang ada di Yogyakarta untuk melakukan sosialisasi dengan datang keperkumpulan teman-teman difable. Kita mengundang mereka kesini dan juga melakukan simulasi. Di difable ini kpu kota yogyakarta di tahun 2014 mendapat penghargaan no 1 seindonesia sebagai kpu kota/kabupaten yang berhasil melaksanakan dan memfasilitasi kawan-kawan difable. Apa yang kami lakukan kami memfasilitasi kawan-kawan difable itu mulai dari sosialisasai, simulasi dengan brail (surat suara brail) alat bantu coblos brail kemudian di hari H (pileg) kpu kota menyediakan alat bantu coblos bagi kawan-kawan di dprd untuk pemilihan dprd kota Yogyakarta sedangkan kpu DIY untuk DPRD DIY sehingga di Indonesia satu satunya daerah yang kaum difable (khususnya tunanetra) dapat pelayan lebih untuk alat bantu coblos. Kemudian kita juga melakukan ke teman KPPS untuk bisa menyediakan akses TPS buat teman difable, kemudian kita juga meminta teman dibafle untuk menjadi penyelenggara pemilu pada level KPPS dan juga PPS dan itu ada. Itu beberapa hal yang kita lakukan untuk kawan-kawan difable dan itu semua bekerja sama dengan teman-teman pegiat difable. Di setiap event acara tentu saja kita selalu menyediakan penerjemah untuk kawan - kawan tuna rungu, itu kita sediakan entepreter untuk teman-temen tuna rungu, harapan kami proses sosialisasi benar-benar masuk di kaum difable.”

(wawancara dengan Sri Surani, September 2016)

Menurut penuturan Sri Surani diatas menyebutkan bahwa tahapan sosialisasi hingga pemilihan ternyata menarik minat dari kaum difable karena KPUD kota Yogyakarta ini memberikan fasilitas yang sangat baik hal ini di tunjukan dengan antusiasme pemilih difable dan penghargaan yang di peroleh KPUD Yogyakarta atas penyelenggaraan pemungutan suara di pemilu 2014 bagi kaum difable. Jadi menurut analisa peneliti, sukses besar pelaksanaan sosialisasi terhadap kaum difable adalah wujud orientasi pelayanan maksimal sesuai dengan tujuan sosialisasi pemilihan umum hingga memudahkan akses, kesadaran dan pemahaman serta pengetahuan tentang pemilu kepada kaum difable.

Menurut peneliti memperhatikan masyarakat penyandang difabel atau disabilitas ini adalah sebuah catatan bagus dalam pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh KPUD kota Yogyakarta, dengan memberikan pemahaman dan pengetahuan yang baik, melakukan simulasi pencoblosan yang pada akhirnya penyandang difabel atau disabilitas tidak mengalami kendala dalam proses pelaksanaan pemungutan suara pada waktu pemilihan. Dari untaian penjelasan yang telah disampaikan oleh narasumber atau informan primer yakni dari pihak KPUD kota Yogyakarta, maka peneliti melakuakan observasi lebih mendalam dengan mencari informasi lain dari pihak penyandang disabilitas maupun dari pihak Relasi yang mengkoordinir kaum disabilitas, hasil yang didapat oleh peneliti dikodingkan dalam bentuk teks, adapun hasil wawancara adalah sebagai berikut :

“Sebagai Relasi, saya pribadi selaku bagian dari tim relawan mempunyai tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan tugas saya sebagai relawan mas, soalnya ditangan kami inilah nantinya akan dilihat bagaimana kinerja kami dalam memberikan kontribusi untuk keberlangsungan pemilihan di pemilu bagi kaum difabel. Tanggung jawab sosial yang kami emban berat mas, apalagi dengan memberikan sosialisasi kepada saudara-saudara kita yang mengalami difabel, tentu kami menggandeng beberapa organisasi yang menangani atau lebih memahami bagaimana berinteraksi dengan mereka (difabel), maka dari itu juga mas peran penting yang dilakukan oleh sigap, sabda juga mempengaruhi kinerja kami, apalagi di kota Yogyakarta ini temen-temen difabel ini cukup banyak, dari data yang ada juga mencapai 300 an orang, beruntung bagi kami, berkat kerjasama yang dilakukan dengan mereka (organisasi pendukung) itu yang mempermudah akses kami dalam memberikan bentuk sosialisasi dan simulasi pemilihan).” (wawancara dengan relasi bidang difabel Widi Haryanti, pada Oktober 2016)

Tidak hanya menjelaskan tentang sosialisasi, Widi Haryanti juga memberikan penjelasan kepada peneliti tentang banyak informasi tentang hal lain yang terdapat dapat proses sosialisasi antara lain adalah penggunaan alat simulasi (APS), intensitas waktu sosialisasi dan penggunaan unsur budaya dalam sosialisasi, adapun hasil wawancara yang diperoleh adalah sebagai berikut :

“Untuk simulasi pakai template itu alat peraga sosialisasinya ada, kebetulan di kota Yogyakarta KPU menyediakan 3 alat template untuk 3 surat suara, yang lainnya kan tidak hanya di kota yang menyediakan. Jadi boleh dibilang KPU kota Yogyakarta responsifnya untuk penyandang disabilitas lumayan cukup baik bahkan bisa dibilang sangat baik untuk disabilitas penyediaan alat bantu penyandang disabilitas “khususnya netra”. Luamayan cukup baguslah komunikatifnya itu lumayan baik bahkan sampai sekarang pun juga masih baik. Kalau pemilihan presiden itu hanya 1 kali saja disetiap organisasi atau komunitas disabilitas, berbeda dengan pemilihan legislatif di pemilu legislatif lebih sering dilakukan sosialisasinya. Engak ada unsur budaya pokoknya kita dalam sosialisasi ya murni pemilihan umum aja yang kita munculkan istilahnya pendidikan politiknya yang kita munculkan bukan budayanya. Kalau simulasi kemaren yang hadir sekitar

70 orang yang di sosialisasikan yang bersosialisasi ada beberapa teman dari berbagai komunitas sigab dari KPU dan relasi semua sekmen hadir bukan hanya segmen yang menyandang disabilitas saja tapi seluruh segmen hadir dalam berpartisipasi untuk bersosialisasi.

(Wawancara dengan Widi Haryanti, pada November 2016)

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak Relasi yang tupoksinya bergerak dibidang kaum disabilitas, dapat diketahui bagaimana proses pelaksanaan sosialisasi kepada kaum disabilitas, penggunaan APS, intensitas waktu dan juga diketahui penggunaan unsur budaya. Bukan menjadi alasan yang salah apabila pelaksanaan sosialisasi presiden di 2014 lalu KPUD kota Yogyakarta sukses dalam pelaksanaan proses sosialisasi, hal ini terbukti dengan penghargaan yang telah didapat. Penggunaan alat peraga inilah yang bagi kaum tuna daksa memberikan akses kemudahan bagi penyandanganya untuk memahami tatanan pemilihan yang akan dilakukan, dan ini merupakan sebuah terobosan yang sangat membantu bagi proses pelaksanaan sosialisasi kedepannya, kemudian mengenai lingkup dan intensitas dari sosialisasi maka diketahui bahwa untuk sosialisasinya sendiri hanya dilakukan sekali disetiap group dan mampu memobilisasi massa yang cukup banyak, hal tersebut dapat diketahui dari hasil wawancara yang menyebutkan bahwa ada 70an orang partisipan yang hadir disitu. Akan tetapi menjadi dikesampingkan usur-unsur budaya yang ada di Kota Yogyakarta untuk dijadikan sebagai metode sosialisasi.

Membahas kembali sayap KPUD kota Yogyakarta yakni Relasi dari penuturan informan atau sumber yakni Widi Haryanti, wawancara kepada salah satu yang menkoordinir kegiatan sosialisasi yang ditunjukkan kepada

kaum disabilitas ini merupakan salah satu elemen penting bagi peneliti guna mengetahui lebih mendalam bagaimana peran KPUD kota Yogyakarta ini dalam memberikan sebuah edukasi kepada penyandang disabilitas. Dari untaian penjelasan yang telah dijelaskan oleh Widi Haryanti diatas, memberikan pemahaman bagi peneliti akan peran yang dilakukan oleh Relasi dalam menjalankan proses-proses sosialisasi pemilu. Tentu dalam memberikan sebuah pemahaman baru kepada kaum disabilitas tidak semata-merta menggunakan sumber daya yang dimiliki KPUD Kota Yogyakarta dan Relasi saja, tetapi juga melibatkan unsur yang betul-betul paham tentang karakteristik maupun yang memahami tentang kaum disabilitas.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak KPUD kota Yogyakarta juga mengatakan bahwa memberikan sebuah akomodasi bagi pemilih disabilitas guna memperlancar kinerja KPUD kota Yogyakarta dan Relasi dalam menjalankan tugas kenegaraan dalam hal pemilu presiden dan wakil presiden 2014, akomodasi itulah yang menurut peneliti menjadikan dampak positif bagi kaum penyandang disabilitas itu sendiri, dengan akses khusus yang diberikan oleh KPUD memberikan kenyamanan bagi kaum disabilitas untuk menyalurkan hak-hak suaranya dalam kontestasi pemilu di tahun 2014.

Tidak berhenti pada pihak KPUD kota Yogyakarta dan Relasi bagian koordinator disabilitas, peneliti juga melakukan observasi wawancara dengan beberapa penyandang disabilitas yang dipilih secara acak, guna membandingkan data wawancara yang telah dikeluarkan oleh pihak KPUD

kota Yogyakarta dengan kondisi riil yang diterima oleh masyarakat atau kaum disabilitas melalui lembaga yang bergerak pada disabilitas, yakni Sigap, dengan hasil wawancara sebagai berikut ;

“dalam pelaksanaan sosialisasi pemilu ya mas, kebetulan menggandeng kami sebagai satu mitra KPU untuk membantu memberikan sosialisasi kepada rekan-rekan difabel, tugas kami menjadi penghubung kedua belah pihak, yaitu KPUD dan rekan difabel, soalnya kan ya disabilitas itu beda-beda kan yang dialami, jadi peran kami sebagai penghubungnya aja, biar apa yang dijelaskan oleh KPUD itu bisa diterimakan oleh rekan-rekan difabel, menurut pengamatan kami sih dalam proses sosialisasi yang diberikan KPUD kemaren itu menarik ya, dengan memberikan contoh tata cara pencoblosan kepada rekan difabel dengan alat yang sudah mereka sediakan, sehingga memudahkan rekan difabel dalam memahami penyampaian itu.”
(wawancara dengan Sigap, pada Oktober 2016)

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan pihak sigap menyebutkan bahwa peranan lembaga tersebut adalah sebagai pendamping fasilitator dan penghubung untuk KPUD kota Yogyakarta dalam mentranskripsikan maksud dan tujuan sosialisasi kepada penyandang disabilitas, dari penuturan pihak sigap, metode sosialisasi yang diberikan oleh KPUD kota Yogyakarta dinilai menarik dan mudah dipahami oleh penyandang disabilitas, apalagi dengan adanya alat peraga pemilu yang disediakan oleh pihak KPUD memudahkan kaum disabilitas dalam memahami tata cara pemilihan pada pemilu.

Dapat dilihat disini peran KPU sebagai fasilitator kaum disabilitas untuk melakukan simulasi dengan menggunakan brail atau alat bantu coblos yang pada akhirnya penyandang disabilitas tidak mengalami kendala dalam proses pelaksanaan pemungutan suara pada waktu pemilihan umum.

Kemudian KPU juga sebagai motivator memotivasi pemilik hak suara untuk bisa memberikan kontribusi dalam pemilihan umum, dengan cara memberikan sosialisasi kepada kaum difable dan memberikan praktek dengan alat peraga sosialisasi dengan tujuan untuk menarik minat partisipasi warga.

c. Kaum Perempuan

Kaum perempuan secara umum di Indonesia berdasarkan data BPS 2014 lebih banyak daripada jumlah lelaki, dalam pemilu peran perempuan yang memiliki hak suara juga sangat urgensi posisinya sebagai penentu kesuksesan penyelenggaraan pemilu. Di kota Yogyakarta sendiri jumlah wanita yang memiliki hak suara jumlahnya lebih banyak daripada laki-laki, dari data pemutahiran KPUD kota Yogyakarta 2014 jumlah pemilih total di kota yogyakarta sebanyak 310.280 jiwa, dengan jumlah pemilih perempuan sebanyak 161.045 jiwa, sedangkan jumlah pemilih laki-laki jumlahnya lebih sedikit, yakni sebanyak 149.235 jiwa. Menimbang aspek perempuan yang jumlahnya lebih banyak perempuan maka berdasarkan ketetapan KPU RI, KPUD kota Yogyakarta juga membentuk tim Relasi yang khusus membidangi untuk pemilih perempuan, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari Relasi Perempuan ini adalah membantu KPUD kota Yogyakarta dalam mensosialisasikan pemilu presiden kepada perempuan, dibentuknya relawan ini tentunya menginginkan partisipasi pemilih perempuan untuk ikut andil dalam pemilu 2014 guna tercapainya target yang telah ditetapkan sebelumnya. Lebih lanjut peneliti mewawancarai pihak KPUD kota Yogyakarta yang memiliki kapabilitas dalam menjelaskan peran sentries dari keberadaan

Relasi Perempuan ini, adapun hasil yang didapat dari wawancara adalah sebagai berikut ;

“Relasi perempuan adalah perpanjangan tangan dari KPUD kota Yogyakarta yang membantu kami dalam mensosialisasikan pemilu kepada masyarakat, khususnya kaum perempuan ya *mas*.tetapi tetap kami yang ada di KPUD ini sebagai *leadernya*. Fokus utama dari kinerja relasi perempuan ini ya khusus pada sektor perempuan, masuk kedalam masyarakat guna menjelaskan dan mensosialisasikan tentang tata cara dan tahapan pelaksanaan pemilu. Tim relasi perempuan inilah yang masuk ke segala elemen masyarakat perempuan, misalnya masuk ke kelompok masyarakat melalui PKK, pertemuan RT/RW dan didalam situ lah nantinya kita dan tim relasi bekerja dalam memberikan pencerian kepada kaum perempuan.”

(Wawancara dengan ibu Surani SP, pada Oktober 2016)

Dari untaian yang telah dijelaskan oleh Sri Surani selaku pihak yang paham betul mengenai mekanisme dan tata pelaksanaan Relasi terhadap proses realisasi, maka proses keberlangsungan sosialisasi yang melibatkan kaum perempuan yang dikoordinatori oleh Relasi perempuan berjalan baik, karena tim relasi perempuan ini masuk kedalam setiap segmen kelompok-kelompok masyarakat yang tersebar di kota Yogyakarta. Pengarahan yang diberikan ini tentu memberi akses mudah bagi masyarakat perempuan untuk mengetahui secara lebih detail tentang bagaimana cara dan tahapan yang harus dilakukan pada waktu pelaksanaan pemilu tahun 2014, hal ini dilakukan tentu tidak mengkesampingkan aspek bahwa dari data-data yang telah dirilis bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada kaum laki-laki, sehingga perlu adanya perhatian khusus dari KPUD kota Yogyakarta untuk kaum perempuan yang ada di lingkup kota Yogyakarta.

Selain mewawancarai dengan pihak KPUD kota Yogyakarta, peneliti juga melakukan wawancara guna mencari informasi yang lebih mendalam tentang bagaimana sosialisasi yang dilakukan kepada kaum perempuan, dengan mewawancarai Sri Lestari, koordinator kaum perempuan, beliau menjelaskan tentang tahapan sosialisasi, adapun hasil yang didapat adalah sebagai berikut ;

“Proses sosialisasi pertama kita kulonuwon dulu kemasing-masing kelompok, dalam arti di situ kita ke pkk kita masuk ke paling bawah rt, rw, kemudian kelurahan, nah dari situ kita mulai sosialisasi dengan kaum perempuan untuk tidak mengarah ke golput selama ini kalau perempuan “ya sudah lah bapaknya aja yang nyoblos” di sini kita menarik agar mereka juga ikut berpartisipasi untuk pemilihan pilpres kemaren. Kalau di pahami dan tidaknya itu kita menggunakan bahasa sederhana jadi ketika kita sosialisasi kita memotivasi untuk perempuan itu harus mulai, dalam arti gini peranan perempuan itu untuk pembangunan ke depan itupun ya peranan penting jangan hanya manut-manut saja, terus kita kan sosialisasinya dengan bahasa sederhana yang bisa di mengerti mereka, selain itu kita menunjukkan beberapa gambar-gambar dari mulai pemilihan, tapi kan itu tidak langsung di tampilkan cara mencoblosnya, kemarenkan dengan sistem coblos jadi kita sosialisasikan dengan aplikasi ini gambarnya, caranya, terus cara membuka semua itu sudah di terangkan secara jelas.”
(Wawancara dengan Sri Lestari, pada November 2016)

Dari proses yang dilakukan tersebut diketahui bahwa pelaksanaan sosialisasi dilakukan dari tingkatan unsur yang paling bawah, yakni masuk ke sektor rt/rw, dengan demikian maka akan mampu merangkul elemen kaum perempuan untuk diberikan pemahaman-pemahaman tentang pemilu, tidak hanya dilakukan melalui komunikasi secara verbal, tetapi juga penggunaan alat peraga simulasi juga digunakan, hal ini adalah lumrah digunakan untuk memudahkan pemahaman yang diberikan pemateri kepada kelompok sasaran perempuan dengan tujuan meningkatkan pemahaman tata cara pemilu.

Selain informasi yang diberikan tentang sosialisasi tersebut, juga ditanyakan peneliti kepada Sri Lestari tentang intensitas waktu sosialisasi dan penggunaan unsur budaya dalam pelaksanaan proses tersebut, adapun hasil wawancara yang didapat adalah sebagai berikut ;

“kami misalnya dari sub rt,rw kita sendiri relasi yang turun. Kita termasuknya di jatah untuk sesering mungkin karna dalam 1bulan ada jadwal, misalnya dalam 1 minggu 3 kali jadi dalam 1 bulan bisa lebih. Tapi untuk laporan ke kpu nya kita memang 1 bulan di jatah cuman 8 kali tapi kita kan bisa lebih dari 8 kali. Karena pertemuannya kan berbeda-beda mas. Kalau unsur budaya kita tembusnya ketika ada event, misalnya pas ada HUT Jogja itu kita sekaligus mensosialisasikan istilahnya kita hanya sosialisasi numpang bukan asli dari kita yang sosialisasi langsung dari kita, minimal kemaren 25 ibuk dari group RT. Kalau dari kelurahan hampir 80orang.”

(wawancara dengan Sri Lestari, pada November 2016)

Intensitas wawancara yang dilakukan oleh KPUD kota Yogyakarta melalui sayap Relasinya cukup intens, dengan melakukan sosialisasi yang mencapai 3 kali dalam satu minggu atau 8 kali dalam sebulan bisa memberikan edukasi bagi kaum perempuan yang diharapkan akan lebih memahami tentang proses pelaksanaan pemilu 2014. Akan tetapi cukup disayangkan bahwa sama seperti unsur kelompok yang lain bahwa tidak ada unsur kebudayaan yang menjadi domain KPUD kota Yogyakarta dalam pengarahannya sosialisasi, jikalau pun ada dalam wawancara yang telah dilakukan Sri Lestari menyebutkan bahwa penggunaan unsur budaya cuma numpang, dan bukan dari hasil dari KPUD sendiri.

KPUD disini berperan sebagai pemberi kewenangan (leader) dengan menunjuk relasi wanita yang nantinya akan membantu KPUD dalam

mensosialisasikan pemilu kepada masyarakat, khususnya kaum wanita. Lebih lanjut KPUD juga tetap berperan secara tidak langsung sebagai fasilitator ataupun motivator bagi kaum wanita melalui relasi wanita dalam mensosialisasikan pemilu.

d. Kaum marjinal

Marjinal berasal dari bahasa Inggris '*marginal*' yang berarti jumlah atau efek yang sangat kecil. Artinya, marjinal adalah suatu kelompok yang jumlahnya sangat kecil atau bisa juga diartikan sebagai kelompok pra-sejahtera. Marjinal juga identik dengan masyarakat kecil atau kaum yang terpinggirkan. Jadi kaum marjinal adalah masyarakat kelas bawah yang terpinggirkan dari kehidupan masyarakat. Contoh dari kaum marjinal antara lain pengemis, pemulung, buruh, petani, pekerja seks komersial, waria dan orang-orang yang penghasilan pas-pasan atau bahkan kekurangan. Mereka ini adalah bagian tak terpisahkan dari Negara ini.

Di kota Yogyakarta juga terdapat kaum marjinal akan dan didalam perundang-undangan kaum marjinal juga memiliki hak dalam pemilihan suara apabila sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan pada perundang-undangan. Keberadaan kaum marjinal ini tidak lepas dari perhatian KPUD kota Yogyakarta yang berperan dalam sosialisasi ke kaum marjinal melalui Relasi yang bertugas khusus dalam penanganan kaum marjinal. Sama halnya dengan Relasi yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, Relasi kaum marjinal juga melakukan peran sebagai perpanjangan tangan KPUD kota Yogyakarta untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang

tahapan dan tata cara memilih menggunakan hak suaranya, Relasi kaum marginal ini tidak bekerja sendiri melainkan bekerja sama dengan organisasi PKBI (perkumpulan keluarga berencana Indonesia) untuk terjun langsung ke titik-titik tempat kaum marginal berkumpul atau bernaung.

Dengan pola kerjasama yang dilakukan Relasi kaum marginal dengan PKBI ini tentu akan memudahkan kinerja serta peran KPUD kota Yogyakarta melalui Relasinya dalam cara sosialisasi tahapan pemilu. PKBI yang banyak berkecimpung didunia sosial dengan memperhatikan tingkat dan pola kehidupan yang dijalani oleh kaum marginal maka tentunya menjadi hal yang tepat bagi KPUD kota Yogyakarta untuk mendapatkan fasilitas dari pihak fasilitator. Untuk memperdalam pengetahuan peneliti tentang peran KPUD kota Yogyakarta dalam memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang kaum marginal maka dilakukan wawancara, adapun hasil wawancara yang didapat adalah sebagai berikut :

“Untuk sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD melalui Relasi yang bergerak pada kaum marginal, kami menggandeng organisasi yang konfortable dengan hal itu mas, ada beberapa organisasi masyarakat yang kita ajak kerjasama dalam proses sosialisasi, misalnya aja PKBI, nah dari PKBI ini kita dapat info mas tentang kaum marginal, titik-titik marginal, dan lain sebagainya. Untuk sosialisasinya sendiri kami dengan KBPI mendatangi titik-titik sentral dimana kaum marginal itu ada, misalnya pada anak-anak jalanan, tmpat mangkal minoritas PSK, waria, nah dengan mendatangi elemen-elemen itulah kita bisa berinteraksi dengan mereka dan memberikan sosialisasi tentang pemilu di 2104. Kalau tidak ada kerjasama dengan pihak PKBI tentu kita akan sulit mendapatkan akses untuk masuk kedalam lingkup masyarakat marginal itu.”

(wawancara dengan Sri Surani, pada Oktober 2016)

Dari kutipan wawancara yang dilakukan peneliti kepada pihak KPUD kota Yogyakarta yang diwakili oleh Sri Surani didapat hasil bahwa kerjasama yang dilakukan instansinya dalam memberikan sosialisasi tidak lepas dari pihak ketiga, yaitu PKBI, tanpa adanya bantuan dari PKBI pihak KPUD akan sulit untuk memasuki zona kaum marginal tersebut, melalui titik sentral dari keberadaan kaum marginal sehingga dengan pola kerjasama yang diterapkan itulah yang menjadi sarana dalam menjangkau target yang akan diberikan sosialisasi. Akan tetapi, peneliti tidak menemukan data-data yang lebih detail karena KPUD kota Yogyakarta tidak mengadakan pendataan secara detail berapa jumlah kaum marginal di Yogyakarta dikarenakan kaum marginal merupakan aspek minoritas yang berada di lingkup lingkungan kota Yogyakarta, sehingga keberadaan yang sedemikian tersebut bukan menjadi prioritas yang pokok bagi pelaksanaan proses sosialisasi.

Untuk mendapatkan informasi yang lebih mendetail tentang proses sosialisasi kepada kaum marginal, pada hal ini peneliti lebih mewawancarai dari kalangan waria, hal ini dipilih peneliti karena objek peneliti tersebut merupakan kaum minoritas yang perlu digali informasinya dan tentunya memiliki perbedaan dengan pemilih yang normal. Dengan mewawancarai Yuni Sarah Al Bukori (nama waria) atau Heru Baskoro (nama identitas sesuai KTP), peneliti menanyakan tentang proses sosialisasi, metode pendekatan, intensitas sosialisasi, didapat hasil sebagai berikut :

“Sebelumnya aku memberitahu KPU bagaimana cara berkomunikasi dengan teman-teman waria agar mudah di pahami karena teman-teman waria berbeda dengan yang lain, tingkat pemahamannya (waria) harus di tekankan lagi dan juga kalau bisa

tidak menggunakan bahasa yang tinggi, jadi harus menggunakan bahasa harian mereka (waria) saja yang artinya itu bisa mudah ditangkap dicerna dan di pahami oleh teman-teman waria. Seingat aku dulu itu ya KPU sering ya sering-sering melakukan sosialisasi khususnya ketika menghadapi jelang pemilu dan dulu intens sekali terutama ketika pas pemilu pemilihan presiden, ada beberapa kali kesempatan aku hadir dimana mereka melakukan sosialisasi salah satunya di teman-teman komunitas waria di badran ya di situ teman-teman KPU hadir, terus juga di lembaga pas saat aku masih kerja di PLDI satu hati juga pernah dan juga di LSM kebaya, aku pikir hal yang sangat bagus yaa terutama bagaimana mereka memberikan informasi terutama kepada teman-teman di komunitas aku (waria). Iya ada, mereka melakukan alat peraga yaa beberapa contoh gitu kan di jelaskan di teman-teman waria gitu yaa, itupun juga terjadi proses artinya diskusi yaaa jadi ketika teman-teman KPU sedang menerangkan dan teman-teman waria yang belum paham itu juga terjadi proses tanya jawab. Artinya menurut aku tu sangat bagus dengan adanya sosialisasi yang seperti itu. Karena tidak semua teman-teman waria artinya punya hak pilih. Waktu itu cuman hanya 1kali di komunitasku, ya bisa saja mungkin teman-teman KPU juga melakukan sosialisasi ketempat lain atau kekomunitas yang lain.”

(Wawancara dengan Yuni Sarah Al Bukori, kaum waria pada November 2016)

Dari yang telah dijelaskan oleh saudara/i Yuni Sarah selaku bagian dari komunitas marjinal dan lebih khususnya kaum waria, dapat diketahui bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan, karena mereka berbeda maka proses sosialisasi yang diberikan juga berbeda, dengan melakukan pendekatan kepada PLDI yang memang bergerak dibidang kaum marjinal tentu memudahkan dalam proses sosialisasi yang diberikan kepada kaum waria, dan masukan yang telah diberikan oleh Yuni Sarah tersebut juga memberikan dampak yang bagus untuk diperhatikan oleh pihak KPUD kota Yogyakarta,

sehingga proses pelaksanaan sosialisasi tidak mengalami kendala yang cukup mengganggu.

Dari wawancara yang dilakukan peneliti kepada pihak KPUD kota Yogyakarta dan sasaran sosialisasi yakni kaum waria, dapat diketahui bahwa proses pelaksanaan sosialisasi yang direncanakan oleh KPUD kota Yogyakarta sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Merangkul segala elemen masyarakat yang ada di kota Yogyakarta termasuk kaum marginal merupakan salah satu kewajiban KPUD yang harus dilaksanakan.

KPUD disini berperan sebagai motivator yang bertujuan mendekati person/group untuk memberikan sosialisasi, pengarahan dan pemahaman tentang pemilu diberikan tatanan cara/proses pemilu, kesetaraan hak dalam pemilu dan memberikan hak suaranya pada pemilu.

B. Metode sosialisasi pemilu

Metode sosialisasi merupakan salah satu cara yang digunakan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga masyarakat diharapkan mampu menerima pemahaman yang diberikan oleh fasilitator. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah peraturan komisi pemilihan umum nomor 39 tahun 2009 tentang tujuan dan capaian target dari sosialisasi. Senada dengan pengaplikasian undang-undang tersebut yang dimaksudkan dan diterapkan oleh KPU RI maka KPUD kota Yogyakarta juga menggunakan metode tersebut dengan mengambil intisari-intisari pemikiran metode sosialisasi yang tertuang pada perundang-undangan yang kemudian dikembangkan dan dimodifikasi guna untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat kota Yogyakarta secara khususnya,

dari undang-undang tersebut terdapat beberapa metode yang digunakan sebagai bahan sosialisasi pemilu, ada beberapa metode yang dilakukan KPUD kota Yogyakarta dalam menerapkan metode sosialisasi, anantara lain adalah sebagai berikut :

1. Komunikasi

Secara garis besar komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan atau informasi antara dua individu atau lebih dengan efektif sehingga dapat memhami dengan mudah. Dari sisi komunikasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat diketahui cara sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD kota Yogyakarta, pada penerapan dilapangan KPUD banyak melakukan sosialisasi dengan cara metode komunikasi hal ini dikarenakan bahwa komunikasi adalah bagian penting dalam menyampaikan informasi guna dipahami oleh pihak atau orang lain. Dalam hal ini KPUD kota Yogyakarta sebagai instansi yang mempunyai wewenang dan peran dalam mensosialisasikan perihal tata cara pelaksanaan pemilu maka perlu mengacu pada struktur komunikasi yang baik, komunikasi dibangun atas dasar dari berbagai aspek yang dilihat dari tingkatan pendidikan, sosial masyarakat marjinal hingga masyarakat mapan, sehingga adanya komunikasi yang baik diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih kepada masyarakat di berbagai segmen yang di kelompok sasaran sosialisasi secara khusus dan masyarakat kota Yogyakarta secara umum.

Di kota Yogyakarta tentu terdapat berbagai elemen masyarakat yang memiliki klasifikasi tersendiri dalam penerapan pola komunikasi, diberbagai elemen itu KPUD kota Yogyakarta beserta Relasi menyusun dan menetapkan

metode yang paling tepat diperuntukkan dalam sosialisasi agar nantinya dapat diterima dilingkup elemen masyarakat. Dari pembagian metode komunikasi tersebut dibedakan dari beberapa unsur, seperti yang sudah diulas peneliti pada pembahasan sebelumnya. Adapun pemilihan metode yang digunakan untuk kategori pemilih pemula yaitu dengan melakukan komunikasi secara cara tatap muka ke seluruh anak-anak muda yang memiliki hak suara pemilu dengan mengajarkan atau memberikan materi tentang pemilu didalam sekolah, sedangkan untuk pendekatan komunikasi diluar sekolah KPUD kota Yogyakarta melakukan sosialisasi dengan cara masuk ke dalam lingkupan tempat berkumpulnya anak muda. Metode komunikasi yang digunakan oleh KPUD kota Yogyakarta dengan mendatangi titik point berkumpulnya anak muda untuk memperkuat sosialisasi tentang proses pemilu.

Berbeda halnya pola komunikasi yang diperuntukkan untuk kaum disabilitas, peran KPUD kota Yogyakarta lebih intens dalam memberikan sosialisasi untuk kaum difabel dengan terjun langsung ke lapangan bersama organisasi yang berhubungan langsung dengan kalangan difabel, adapun organisasi tersebut adalah Sigap, Cikal. Penerjunan kelapangan tersebut dilakukan untuk mempermudah maksud dan tujuan dari sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD kepada kaum difabel dengan kerjasama yang dilakukan dengan organisasi yang mempunyai andil besar dalam memperhatikan pola dan tingkah laku kaum disabilitas, hal ini karena dengan bantuan organisasi terkait menggunakan metode yang sudah terbiasa mereka lakukan, dan penggunaan penerjemah dari organisasi masyarakat itulah yang akhirnya akan memberikan

kenyamanan bagi penyandang disabilitas, guna menunjang komunikasi KPUD kota Yogyakarta juga memberikan alat peraga sosialisasi (APS) seperti tata cara memilih tulisan brail dan juga melakukan tahapan simulasi pemilihan.

Selanjutnya adalah pemberian bekal pengetahuan tentang pemilu dengan memobilisasi masa, komunikasi dengan memobilisasi massa seperti yang diuraikan peneliti pada penjelasan sebelumnya, KPUD kota Yogyakarta mengajak atau memobilisasi massa untuk lebih peduli terhadap proses pemilu. Hal tersebut ditunjukkan ketika KPUD kota Yogyakarta melalui Relasi dengan masuk ke setiap komponen masyarakat melalui organisasi kemasyarakatan seperti RT, RW, PKK, kelompok keagamaan, dan kelompok minoritas marjinal. Hal ini tentu menjadi sebuah akses yang tidak sulit untuk diterapkan oleh KPUD kota Yogyakarta dengan masuk ke segala unsur masyarakat dikarenakan kondisi geografis kota Yogyakarta yang sangat strategis, sehingga tidak ada hambatan yang menyulitkan pihak KPUD kota Yogyakarta dan Relasi dalam memberikan sosialisasi dan simulasi tentang pemilu.

Pola komunikasi yang dilakukan pihak KPUD kota Yogyakarta dalam memobilisasi massa tentu menjadi apresiasi yang perlu diperhatikan oleh peneliti, karena dengan adanya mobilisasi yang dilakukan kepada segenap unsur masyarakat yang ada di kota Yogyakarta tentu akan mempermudah aspek sosialisasi itu sendiri, kehadiran KPUD kota Yogyakarta yang masuk kedalam organisasi masyarakat tidak lain untuk merangkul seluruh elemen masyarakat yang ada di kota Yogyakarta sehingga diharapkan dari pendekatan dan komunikasi yang dilakukan oleh KPUD melalui kelompok masyarakat mampu

mengurangi kecenderungan penurunan angka partisipan pemilih dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2014 dan pemilu-pemilu yang akan mendatang.

2. Komunikasi melalui media massa

Media massa adalah singkatan dari media komunikasi massa dalam bahasa Inggris *massa communication media*, yang berarti media massa yaitu sarana penyampaian pesan-pesan, aspirasi masyarakat, sebagai alat komunikasi untuk menyebarkan berita ataupun pesan kepada masyarakat langsung secara lain, adapun jenis-jenis dari media massa antara lain, media cetak (majalah, Koran, surat kabar dan lain-lain), media elektronik (radio televisi, ataupun video dan lainnya) dan media siber (media sosial, website, portal berita, blog dan lainnya).

Pada pembahasan sebelumnya tentang media komunikasi yang dilakukan oleh KPUD, instansi tersebut juga melakukan metode melalui komunikasi dengan media massa, baik menggunakan media cetak, media elektronik maupun media siber, dalam sosialisasinya KPUD kota Yogyakarta juga membuat alat peraga simulasi (APS) yang ditujukan sebagai salah satu cara mempermudah dalam teknis sosialisasi. Kemudian dalam perkembangannya APS yang di buat oleh KPUD kota Yogyakarta lebih banyak menggunakan media massa sebagai fasilitas sarana teknis sosialisasi, hal ini dapat dilihat dari sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD bersama Relasi dalam pembuatan pamflet dan leaflet yang digunakan untuk mengedukasi semua segmen masyarakat kota Yogyakarta, penggunaan pamphlet dan leaflet ditujukan untuk pemilih pemula dan juga disebarkan ataupun didistribusikan keseluruh masyarakat kota Yogyakarta.

Adapun maksud dari penggunaan pamflete dan leflate ini mengharapkan masyarakat jadi bisa dengan mudah mengetahui tentang sistematika tahapan pemilu presiden yang dilakukan di Yogyakarta, pamflete dan leplate, dengan demikian maka tahap penyebaran dan pendistribusian pamflet dan leflat merupakan dasar sosialisai yang dilakukan oleh KPUD kota Yogyakarta sebelum dilakukan sosialisasi group per group. Selain penggunaan media massa berupa pamflet dan leflate pihak KPUD kota Yogyakarta juga menyuguhkan masyarakat dengan metode sosialisasi lain yang menggunakan media massa yaitu dengan membuat banner tentang informasi-informasi seputar pemilu di tepi-tepi jalan kota Yogyakarta, dan lokasi-lokasi strategis yang mudah dijangkau dan dilihat sekitarnya agar tidak hanya dengan pamflete dan leflate saja masyarakat mendapatkan informasi dasar tentang pemilu, tetapi juga penggunaan dari banner diharapkan masyarakat mendapat keuntungan informasi dari pemasangan banner yang ditempatkan dititi-titik strategis dipelataran atau jalan-jalan di kota Yogyakarta dapat mengetahui informasi pemilu di dalam aktifitas perjalanan mereka.

Selain pamflete, leflate dan banner KPUD kota Yogyakarta juga memanfaatkan media massa lain sebagai sarana mensosialisasikan agenda KPUD, adapun media massa yang dibahas oleh peneliti ini adalah penggunaan media massa surat kabar atau koran. Dengan menggunakan surat kabar atau koran merupakan beberapa bentuk dan langkah KPUD kota Yogyakarta untuk mensosialisasikan tentang pelaksanaan teknis dari tahapan pemilu dengan menggunakan sarana media cetak.

Tidak hanya memanfaatkan media cetak dalam proses sosialisasinya, metode komunikasi massa seperti media elektronik juga dimanfaatkan untuk sarana dan prasana sosialisasi, ada beberapa media massa elektronik yang digandeng KPUD kota Yogyakarta untuk menunjang pengenalan pemilu kepada masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta secara umum dan masyarakat kota Yogyakarta secara khusus, adapun media massa yang digunakan dalam proses pelaksanaan sosialisasi antara lain adalah media-media yang memberikan informasi secara visual seperti penggunaan televisi lokal kota Yogyakarta, radio-radio yang menjangkau wilayah kota, dan bahkan penggunaan audio visual berupa video tron.

Penggunaan video tron yang dilakukan oleh KPUD kota Yogyakarta merupakan sebuah inovasi baru dan yang pertama yang dilakukan dalam proses memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Penggunaan media video tron ini sebagai inovasi sosialisasi ini juga sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak KPUD kota Yogyakarta, adapun transkrip wawancara yang didapat peneliti adalah sebagai berikut;

“Penggunaan Video tron ini adalah inovasi terbaru dari KPUD kota Yogyakarta dan yang pertama dilakukan KPUD di seluruh Indonesia, selain video tron mas, inovasi kami melalui penggunaan alat peraga sosialisasi juga yang pertama di Indonesia.”
(wawancara dengan Sri Surani S.P, pada Oktober 2016)

Dari penjelasan diatas yang mengembangkan dari hasil wawancara yang dilakukan dilapangan dapat diketahui bahwa kota Yogyakarta melalui KPUD mampu memberikan kontribusi yang sangat positif bagi perkembangan penyelenggaraan sosialisasi pemilu. Sehingga inovasi yang dilakukan oleh KPUD

kota Yogyakarta ini juga diadaptasi oleh daerah lain guna memperlancar sosialisasi.

Mengulas lagi tentang metode sosialisasi dengan menggunakan sarana media massa, pihak KPUD juga melihat sisi perkembangan teknologi, dengan perkembangan teknologi inilah yang membuat KPUD kota Yogyakarta juga melakukan sosialisasi melalui media siber, adapun jenis dari media siber ini cukup banyak mulai dari media sosial Facebook, Twitter, Blog maupun website. Tidak bisa dipungkiri dengan kemajuan teknologi yang semakin mutakhir dan pola masyarakat yang “urban” dari media cetak ke media sosial serta pengguna media sosial yang semakin banyak, menjadikan hal tersebut sebagai peluang bagi KPUD kota Yogyakarta guna mensosialisasikan hal-hal tendensius terkait dengan pelaksanaan pemilu dengan menggunakan media siber (sosial).

Media siber KPUD kota Yogyakarta juga memasukan data-data atau laporan dan informasi tentang pemilihan umum kedalam website, blog, maupun media sosial yang dikelola oleh pihak KPUD agar masyarakat juga bisa mengetahui dengan mengakses ke viral website atau media sosial dan bukan hanya dari mendapati informasi yang bersumber dari media cetak dan tronik saja tetapi juga bisa mengetahui informasi tentang pemilu dari internet, apalagi di era sekarang masyarakat tidak lepas dari pengaruh gadget dan koneksi internet, di era globalisasi ini jangkauan internet sekarang lebih mudah diakses dan didapatkan oleh setiap orang dan juga tidak bisa dipungkiri bahwa penggunaan atau penelusuran data dan informasi lebih efektif dari pada harus menggunakan media-media yang lain. Penggunaan media siber ini juga dilandasi pada observasi yang

telah dilakukan oleh KPUD kota Yogyakarta, karena melihat perubahan segmentasi pola kehidupan masyarakat (pemilih usia muda) yang lebih tertarik membaca atau mencari sebuah informasi melalui viral portal yang ada didalam media-media siber.

Dari uraian serta penjelasan yang telah dikemukakan oleh peneliti mengenai metode-metode yang dilakukan oleh KPUD kota Yogyakarta berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan dapat diindikasikan peranan instansi tersebut berjalan baik, dengan mempertimbangan aspek-aspek penting yang berada dimasyarakat dan diikuti dengan pola ataupun peran aktif dari KPUD kota Yogyakarta yang melakukan program sosialisasi kepada masyarakat. Hipotesa yang dikemukakan peneliti ini didasari atas hasil wawancara yang didapat dengan pihak KPUD selaku penyelenggara, adapun hasil wawancara yang menguatkan pendapat peneliti akan kesuksesan dalam sosialisasi adalah sebagai berikut ;

“metode media massa yang kami lakukan dalam bersosialisai Sangat efektif karena bagaimanapun sepanjang dan sehebat apapun kita untuk bicara di kota Yogyakarta agak berbeda spesifikasinya karena kota Yogyakarta itu tingkat pendidikan politiknya masyarakat lebih tinggi dari pada tempat kabupaten yang lain. Warganya lebih akses terhadap informasi, warganya lebih well lebih cepat mendapat informasi dari pada daerah lainnya sehingga beda karakteristik kami karakteristik penduduk kota dengan tempat kabupaten yang lain sehingga media itu menjadi efektif untuk teman-teman, selain itu kita juga masih tetap memakai pertemuan-pertemuan organik seperti tatap muka.”

(wawancaradengan ibu Sri S, pada Oktober 2016)

Dari penjelasan yang telah disampaikan pihak KPUD kepada peneliti ini menjadi temuan informasi penting untuk mengukur peranan KPUD kota Yogyakarta dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat kota Yogyakarta

pada pemilu presiden 2014. Sehingga apabila proses sosialisasi ini berjalan baik maka sudah sewajarnya mendapat sebuah apresiasi, karena menurut pengamatan peneliti berdasarkan hasil analisis data-data yang didapat di lapangan maupun dari hasil wawancara menunjukkan hal yang selaras.

Disisi lain, peneliti juga perlu menganalisa tentang penggunaan budaya lokal sebagai sarana KPUD kota Yogyakarta dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat kota Yogyakarta, namun dalam prakteknya dilapangan melalui hasil wawancara yang dilakukan, peneliti tidak menemukan penggunaan budaya yang ada secara signifikan di kota Yogyakarta sebagai sarana sosialisasi. Menurut hemat peneliti penggunaan budaya lokal sebagai sarana dalam mensosialisasikan tahapan pemilu perlu dilaksanakan, karena kota Yogyakarta yang dikenal dengan budaya dan kota pelajarinya maka hal tersebut patut dipertimbangan untuk dilakukan pada sosialisasi yang akan mendatang, sehingga ada kesan bahwa proses sosialisai juga mempertimbangkan aspek lokal yang menjadi identitas kota Yogyakarta. Penggunaan sarana budaya sebagai salah satu model sosialisasi akan memberikan dua edukasi yang baik bagi masyarakat, diantaranya adalah memberikan edukasi baru dalam penerapan sosialisasi dan memberi warna baru dalam proses sosialisasi, tidak ada mengacu pada perpindahan sosialisasi era media cetak ke media digital tetapi juga mengkombinasikan unsur-unsur sosialisasi dengan menyisipkan budaya-budaya lokal yang menjadi warisan budaya untuk masyarakat Yogyakarta dan kota Yogyakarta secara khusus.

Meskipun tidak ada unsur budaya yang dimasukkan dalam proses sosialisasi namun dalam hasil akhir pada tahapan pemilu presiden 2014

berlangsung sukses, dalam hal ini peneliti mengatakan hasil akhir sukses karena target yang dibebankan KPU RI kepada KPUD diseluruh Indonesia di angka 75% dan kota Yogyakarta telah memenuhi persyaratan minimum yang telah ditetapkan oleh KPU RI dengan total presentase 77,76%. Selain sukses dalam pencapaian target nasional kota Yogyakarta mendapatkan nilai tertinggi dalam kenaikan presentase dengan membandingkan antara pemilu 2009 dan 2014 dari 4 Kabupaten yang ada di Provinsi Yogyakarta. Adapun rincian data yang analisis oleh peneliti adalah sebagai berikut :

Table 3.4
Perbandingan tingkat partisipasi masyarakat kota Yogyakarta dalam pemilihan umum 2009 dan 2014.

No	Kabupaten atau Kota	Pemilihan Legislatif		Pemilihan Presiden	
		2009	2014	2009	2014
1	Kota Yogyakarta	66,54%	75,88%	69,21%	77,76%
2	Bantul	74,08%	81,20%	79,11%	81,31%
3	Kulonprogo	73,37%	80,66%	73,46%	79,32%
4	Sleman	72,68%	81,40%	77,61%	81,72%
5	Gunungkidul	75,14%	78,53%	75,36%	76,89%
6	Daerah Istimewa Yogyakarta	72,94%	80,02%	75,97%	79,84%

Sumber : Data hasil pemilihan umum 2014 Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan berbagai terobosan yang digalangkan oleh KPUD mendapat dampak positif dalam penyelenggaraan pemilu, meningkat 8,55% dari pelaksanaan pemilu presiden yang dilaksanakan di tahun 2009 yang mendapat presentase sebesar 69,21%. Hal ini menunjukkan bahwa keberlangsungan dari peran KPUD kota Yogyakarta dalam memberikan sosialisasi membawa dampak yang bagus dalam perkembangan demokrasi, selain diiniasi oleh ketokohan dalam pemilu 2014, peran dan inisiasi yang dilakukan KPUD juga tidak bisa dikesampingkan, melalui program-program sosialisasi yang dicanangkan oleh

instansi KPUD kota Yogyakarta juga memberikan hal yang baru kepada masyarakat dengan memberikan alat peraga sosialisasi, pemanfaatan media-media dan tentunya kerjasama dengan berbagai pihak yang membantu dalam proses sosialisasi. Sehingga dari hasil temuan data dan fakta yang dilakukan peneliti, maka disimpulkan bahwa peran KPUD kota Yogyakarta dalam melakukan sosialisasi pemilu presiden 2014 berjalan sukses.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat sosialisasi

a. Faktor Pendukung

Didalam sosialisasi yang dilakukan oleh KPUD kota Yogyakarta tentu terdapat berbagai faktor pendukung yang ada didalamnya, adapun cakupan dari faktor pendukung antara lain adalah sebagai berikut :

1. Jangkauan Geografis

Melihat aspek geografis kota Yogyakarta dengan cakupan luas 32 KM persegi luas wilayahnya tentu bukan wilayah yang masuk kategori luas, apalagi didukung dengan infrastruktur yang sudah baik karena letak kota Yogyakarta yang strategis dan berada dipusat pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga memudahkan dalam memberikan sosialisasi dan memobilisasi kepada setiap elemen masyarakat dengan menggunakan sarana dan moda transportasi yang ada, dengan demikian maka jangkauan yang menjadi target dari objek sosialisasi dapat tercapai.

2. Kerjasama dengan Organisasi masyarakat

Dari untaian pembahasan yang telah diuraikan peneliti pada pembahasan sebelumnya maka terlihat bahwa peran organisasi

masyarakat sangat membantu dalam proses sosialisasi, hal tersebut dapat dilihat dari kerjasama yang dilakukan KPUD kota Yogyakarta dengan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang kaum difabel yakni Sigap dan Cikal yang menjembatani peran KPUD dalam memberikan sosialisasi kepada penyandang difabel, dengan demikian tidak terjadi kendala dalam proses komunikasi yang dilakukan baik dari pihak pembicara atau narasumber yakni KPUD kota Yogyakarta dan dari pihak penyandang disabilitas selaku peserta sosialisasi. Selain kerjasama dengan lembaga swadaya yang bergerak dalam rung lingkup disabilitas, KPUD kota Yogyakarta juga melakukan kerjasama dengan pihak PKBI, sebuah organisasi yang bergerak dibidang kaum marginal, dengan kerjasama yang dilakukan ini menjadi akses bagi KPUD untuk masuk kedalam elemen masyarakat marginal, melalui informasi-informasi yang diberikan oleh PKBI maka memudahkan KPUD kota Yogyakarta dalam melakukan perencanaan guna memberikan sosialisasi kepada kaum marginal yang jumlahnya minoritas dan tersebar diberbagai penjuru kota Yogyakarta. Kerjasama lain juga dilakukan dengan organisasi wanita, dengan masuk melalui kegiatan-kegiatan RT, RW dan kegiatan masyarakat lainnya, dengan didukungnya hal tersebut menjadi faktor plus bagi penyelenggaraan sosialisasi.

3. Media Massa

Di era yang semakin canggih ini tentu menjadi hal yang wajar apabila pihak KPUD kota Yogyakarta melakukan sosialisasi melalui

media massa, karena melihat aspek-aspek yang ada dimasyarakat sehingga penggunaan media massa ini dinilai efektif dalam pelaksanaan sosialisasi. Dengan berbagai pilihan media massa seperti media tronik (yakni televisi, radio) media siber (yaitu media sosial, video tron, website serta blogspot) dan media cetak (yakni surat kabar, banner) tentu akan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi tentang tahapan dan sosialisasi pemilu.

4. Penggunaan Alat Peraga Sosialisasi (APS)

Penggunaan APS ini tentu menjadi faktor pendukung yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui proses sosialisasi, alat APS yang dibentuk atau digunakan oleh KPUD kota Yogyakarta ini juga mencakup semua elemen masyarakat, baik masyarakat yang normal maupun masyarakat yang mengalami disabilitas, sehingga dengan adanya APS yang dikeluarkan oleh KPUD kota Yogyakarta membantu pihak KPUD dalam memberikan sosialisasi guna memperlancar dan mengurangi resiko penurunan pemilih.

5. Peran serta petugas KPUD kota Yogyakarta melalui Relasi

Tidak dapat dipungkiri bahwa sukses atau tidaknya pelaksanaan pemilu berasal dari proses sosialisasi, apabila proses sosialisasi ini berjalan dengan baik maka akan didapat hasil yang linear dengan proses sosialisasi begitupun sebaliknya. Dibalik kesuksesan dari proses sosialisasi yang diklaim oleh pihak KPUD kota Yogyakarta tidak lepas dari peran serta relawan demokrasi (Relasi) yang menjadi gardu depan dalam proses

sosialisasi, relasi inilah yang turun langsung ke lapangan untuk memberikan arahan dan sosialisasi tentang pemilu presiden 2014 dengan masuk kedalam setiap bagian elemen masyarakat. Sehingga didalam proses yang dilakukan relasi inilah yang nantinya menjadi titik kunci keberhasilan dari proses sosialisasi.

b. Faktor peenghambat

1. Target Sosialisasi

Selain menjadi faktor pendukung, sosialisasi juga menjadi faktor penghambat, hal ini juga ditunjukkan pada proses sosialisasi yang dilakukan dengan metode mendatangi pemuda ditempat-tempat terbuka, tempat berkumpul, dan titik-titik sentral, dalam proses yang dilakukan ini juga bisa mengalami margin eror karena yang berada ditempat-tempat sentral yang didatangi oleh pihak KPUD tidak hanya penduduk asli kota Yogyakarta melainkan juga pelajar dari kabupaten lain bahkan daerah lain yang juga menimba ilmu di kota Yogyakarta, sehingga perlu mensortir data-data dari setiap pemilih pemula yang berada disalah satu spot sentral, hal ini akan menimbulkan ketidakefektifan dalam proses sosialisasi yang menargetka pemilu pemula yang terdaftar sebagai pemilih di kota Yogyakarta.

2. Faktor Individualisme yang tinggi

Faktor individualisme yang tinggi ini menjadi penghambat bagi pelaksanaan sosialisasi dimasyarakat, untuk menilai hal ini tentu dilihat dari gap yang terjadi di masyarakat, antara masyarakat perumahan

menengah keatas dengan menengah kebawah, sisi humanis dari masyarakat kota Yogyakarta yang mulai multikultural juga mempengaruhi aspek sosial yang terjadi. Terjadinya individualisme yang tinggi ini dikarenakan karena kepentingan perorangan yang tidak bisa disamakan satu dengan yang lain. Dari hasil wawancara dengan pihak KPUD kota Yogyakarta, menyatakan bahwa tidak ada sanksi sosial yang diberikan di masyarakat kota Yogyakarta karena mengingat pola kehidupan masyarakat kota yang beda dengan daerah pedesaan, ketokohan sesepuh desa masih dijunjung tinggi, jika di daerah pedesaan apabila tidak mengikuti salah satu kegiatan sosial maka akan ada sanksi sosial yang akan diterimakan oleh individu tersebut, akan tetapi berbeda halnya ketika berada di kota, masyarakat cenderung apatis untuk sanksi sosial yang disandangkan kepada individu tersebut.